

ANALISIS PERMINTAAN PEMBIAYAAN PERTANIAN SYARIAH UNTUK USAHATANI PADI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Budi Yoko¹

¹Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat
yoko351@gmail.com

Abstract

Capital constraints and low access to financial services from financial institutions remains a constraint for most farmers in Indonesia. Sharia Cooperative Financial Services or Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) as one of the microfinance institutions that grow and develop in rural areas have potential to improve farmers' access to sources of capital. The objective of this study are to identify the factors that affect farmers' demand to agricultural financing sharia and to estimate realization of agricultural finance sharia for rice farming. The results of multiple linear regression model analysis, it is known that the factors that influence the demand of farmers on agricultural financing of KJKS is cost of funds and farm income. Moral hazard occurs in the realization of agricultural finance, agricultural finance obtained where farmers are not fully applied in rice farming activities.

Keywords: Sharia Agricultural Financing, Financing Demand, KJKS

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keterbatasan modal dan rendahnya akses terhadap fasilitas pembiayaan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh sebagian besar petani di Indonesia. Modal merupakan unsur esensial dalam peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat petani, sehingga menurut Hamid (1986) keterbatasan modal dapat membatasi gerak sektor pertanian. Ditambah lagi pada era teknologi pertanian seperti saat ini, kebutuhan petani akan modal untuk memenuhi input pertanian menjadi lebih intensif. Permasalahan kembali muncul karena sebagian besar petani di Indonesia tidak sanggup mendanai usahatani yang padat modal dengan dana mereka sendiri (Syukur, 2000)

dan memiliki kendala untuk mengakses sumber pembiayaan. Dalam jangka panjang, permasalahan ini dapat menjadi titik awal terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat petani di perdesaan yang sulit untuk diputus (Ashari, 2006).

Kondisi permodalan petani yang lemah sebenarnya telah disadari oleh Pemerintah Indonesia, yang dibuktikan dengan upaya pemerintah untuk meluncurkan berbagai program pembiayaan. Akan tetapi, kinerja dari berbagai program pembiayaan tersebut belum optimal (Ashari, 2006). Salah satu penyebabnya menurut Syaukat (2011) adalah karena timbulnya *moral hazard* pada petani selaku penerima program.

Peran perbankan selaku lembaga intermediasi keuangan dalam menyalurkan pembiayaan pertanian pun sangat rendah. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (2012), jumlah pembiayaan pertanian yang disalurkan oleh perbankan di Indonesia hanya 5.2 persen dari total seluruh pembiayaan.

Guna mengatasi permasalahan keterbatasan akses petani terhadap sumber permodalan, kemampuan fiskal pemerintah yang terbatas, serta keengganan perbankan untuk memberikan kredit atau pembiayaan secara langsung kepada petani, maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan peran lembaga keuangan mikro yang dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi petani di perdesaan. Salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang memiliki eksistensi, baik dalam hal peranan maupun penerimaan di kalangan masyarakat perdesaan, khususnya petani di Kabupaten Lampung Tengah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS merupakan koperasi yang mekanisme operasionalnya mengacu pada prinsip syariah/islam. Sektor pertanian selaku sektor perekonomian utama di Lampung Tengah menjadi pangsa pasar utama dari KJKS di Lampung Tengah. Merujuk data dari Pusat Koperasi Syariah Lampung (Puskopsyah), pada tahun 2013 pembiayaan yang disalurkan oleh KJKS di

Lampung Tengah didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa yang mencapai 63 persen. Sedangkan pembiayaan yang disalurkan bagi sektor pertanian selaku sektor perekonomian utama baru mencapai 26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa petani selaku aktor utama dalam usahatani masih memiliki keterbatasan untuk mengakses sumber permodalan dari lembaga pembiayaan, termasuk KJKS. Keterbatasan dalam mengakses sumber pembiayaan dari lembaga pembiayaan mengakibatkan petani menggantungkan kecukupan modal usahatannya dari modal sendiri yang terbatas atau sumber-sumber lain seperti tengkulak. Kondisi keterbatasan modal atau tingginya *cost of fund* yang harus dikeluarkan petani apabila mengakses pembiayaan dari tengkulak akan berpengaruh terhadap optimalisasi pendapatan dan produktivitas usahatani yang dikelola oleh petani.

Keberadaan KJKS sebagai lembaga keuangan perdesaan yang cukup aktif menyalurkan pembiayaan pertanian bagi petani, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan rendahnya akses petani terhadap lembaga permodalan. Dengan adanya fasilitas pembiayaan pertanian dari KJKS, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan usahatani padi di Kabupaten Lampung Tengah. Oleh

karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai permintaan petani terhadap pembiayaan pertanian syariah di Kabupaten Lampung Tengah.

Keterbatasan aksesibilitas petani terhadap pembiayaan berhubungan dengan *asymetric information* yang terjadi pada pasar pembiayaan, terutama pada sumber pembiayaan formal. *Asymetric information* akan menyebabkan adanya *credit rationing* yang disebabkan karena pembatasan jumlah kredit oleh lembaga keuangan. Akibatnya, jumlah pembiayaan atau kredit yang diberikan lembaga keuangan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diminta (Jafee dan Modigliani, 1969). Hal ini menjadi pemicu timbulnya permasalahan keterbatasan aksesibilitas dan permintaan terhadap sumber pembiayaan.

Bagi sebagian besar petani di perdesaan yang masih terkendala dengan permodalan, keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan dari luar akan mempengaruhi kinerja usahatani, terutama dalam pemenuhan input produksi, sehingga hal ini akan berpengaruh pada produktivitas dari usahatani yang dijalankan. Keberadaan KJKS sebagai lembaga keuangan yang berbasis di perdesaan dan cukup aktif menyalurkan pembiayaan (salah satunya bagi sektor pertanian) diharapkan dapat meningkatkan

akses dan permintaan petani terhadap sumber pembiayaan. Oleh karena itu, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan petani terhadap sumber pembiayaan menjadi penting untuk dilakukan.

Pembiayaan pertanian dari KJKS diarahkan sebagai penguatan modal usahatani. Dengan adanya pembiayaan pertanian dari KJKS diharapkan petani mampu meningkatkan penggunaan input produksi menjadi efisien, sehingga produksi dan produktivitas usahatani meningkat dan pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani padi di Kabupaten Lampung Tengah. Efektivitas dari pembiayaan pertanian untuk meningkatkan alokasi penggunaan input dipengaruhi oleh tingkat realisasi pembiayaan tersebut dalam kegiatan usahatani. Oleh karena itu, realisasi dari penggunaan pembiayaan pertanian dalam kegiatan usahatani padi penting untuk diketahui. Apakah petani menggunakan seluruh pembiayaan yang diperoleh bagi perbaikan input usahatani, atau hanya sebagian yang diaplikasikan di usahatani dan sebagian lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti konsumsi atau keperluan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan petani

terhadap pembiayaan pertanian syariah yang disalurkan oleh KJKS, dan 2) mengestimasi jumlah pembiayaan pertanian yang direalisasikan petani pada usahatani padi.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang merupakan salah satu penghasil utama padi di Indonesia. Jumlah produksi padi Provinsi Lampung pada tahun 2013 mencapai 3.2 juta ton, dan menempati peringkat tujuh secara nasional. Kabupaten Lampung Tengah merupakan penghasil utama padi di Provinsi Lampung. Luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah 4,789.82 km², yang didominasi dataran rendah dengan ketinggian antara 29 sampai dengan 59 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Lampung Tengah memiliki 28 kecamatan dengan Gunung Sugih sebagai ibukota. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1,192,958 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.14 persen.

Kegiatan usahatani padi di lokasi penelitian didukung oleh keberadaan lembaga keuangan mikro perdesaan dan pasar untuk pemasaran hasil panen maupun input usahatani. Pada tahun 2012

jumlah lembaga keuangan mikro perdesaan dalam bentuk koperasi di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 324 unit dengan jumlah anggota sebanyak 75,326 orang (Dinas Koperasi dan UKM Lampung Tengah 2013). Salah satu bentuk jenis koperasi terbesar di Kabupaten Lampung Tengah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Data Dinas Koperasi dan UKM Lampung Tengah pada tahun 2013 menunjukkan jumlah KJKS mencapai 40 unit dengan jumlah anggota sebanyak 15,143 orang. Pasar untuk pemasaran komoditas padi berbentuk oligopolistik. Pedagang besar (tengkulak) yang tersebar di setiap desa merupakan penampung utama hasil padi petani. Sebagian besar petani langsung menjual hasil panennya ketika musim panen, dan hanya menyisakan sebagian kecil untuk persediaan konsumsi keluarga.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2014. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan petani padi yang mengakses pembiayaan dari KJKS. KJKS yang dijadikan contoh adalah KJKS Surya Abadi. Pemilihan KJKS Surya Abadi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan KJKS Surya Abadi merupakan salah satu KJKS dengan *asset* terbesar dan beroperasi di daerah

penghasil padi utama di Kabupaten Lampung Tengah.

Jumlah petani sampel dalam penelitian ini adalah 41 orang yang tersebar di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Seputih Banyak dan Seputih Raman. Kedua kecamatan tersebut merupakan wilayah kerja dari KJKS Surya Abadi dan juga sentra produksi padi di Kabupaten Lampung Tengah yang mendapat pengairan dari irigasi teknis. Pada tahun 2013, sebanyak 18.2 persen produksi padi Lampung Tengah berasal dari dua kecamatan tersebut. Selain itu, jumlah luas panen dari dua kecamatan sampel mencapai 13.37 persen dari total luas panen padi seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah (BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2013). Pengambilan contoh dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *stratified random sampling*.

Model Permintaan Pembiayaan Pertanian Syariah

KJKS sebagai lembaga keuangan mikro semi-formal yang berbasis perdesaan dinilai cukup berhasil dalam menyediakan fasilitas permodalan bagi petani yang berada di perdesaan Lampung Tengah. Hal ini mempertegas temuan Messah dan Wangai (2001) yang menyatakan bahwa bank komersial dan lembaga keuangan formal dinilai gagal dalam memenuhi pembiayaan

bagi pelaku usaha kecil. Akan tetapi, jika dilihat dari jumlah pembiayaan yang telah salurkan oleh KJKS terlihat bahwasanya petani masih terkendala untuk mengakses pembiayaan dari KJKS.

Keterbatasan aksesibilitas dan permintaan petani terhadap pembiayaan berhubungan dengan *asymmetric information* yang terjadi pada pasar pembiayaan. *Asymmetric information* akan menyebabkan adanya *credit rationing*, yang disebabkan karena pembatasan jumlah kredit oleh lembaga keuangan. Akibatnya, jumlah pembiayaan atau kredit yang diberikan lembaga keuangan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diminta (Jafee dan Modigliani, 1969). Hal ini menjadi pemicu timbulnya permasalahan keterbatasan aksesibilitas dan permintaan terhadap sumber pembiayaan.

Untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan pembiayaan pertanian dari KJKS digunakan analisis regresi linier berganda. Model regresi linear berganda merupakan persamaan regresi dengan pendugaan nilai peubah Y (*dependent*) berdasarkan hasil pengukuran beberapa peubah X (*independent*).

Variabel terikat (peubah Y) adalah jumlah realisasi pembiayaan pertanian yang diterima petani dari KJKS. Variabel bebas (peubah X) terdiri dari variabel yang

merepresentasikan karakteristik personal dan sosial ekonomi petani petani sebagai debitur serta beberapa variabel yang terkait lembaga pembiayaan. Dalam hal ini terdapat lima variabel bebas yang dimasukkan dalam model permintaan pembiayaan pertanian, yaitu usia petani (X_1), luas lahan (X_2), *cost of fund* (X_3), pendapatan usahatani (X_4), dan lama menjadi anggota KJKS (X_5). Adapun model permintaan pembiayaan pertanian KJKS adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \alpha_4 X_4 + \alpha_5 X_5 + \mu$$

Dimana:

Y = Permintaan pembiayaan pertanian KJKS (Rp)

X_1 = Usia petani (tahun)

X_2 = Luas lahan (ha)

X_3 = *Cost of fund* (Rp)

X_4 = Pendapatan usahatani (Rp)

X_5 = Lama petani menjadi anggota KJKS (tahun)

μ = Gangguan acak dalam model

Nilai koefisien yang diharapkan adalah $X_1, X_3 < 0$; $X_2, X_4, X_5 > 0$. Adapun hipotesis yang diuji adalah:

H0 = peubah bebas tidak berpengaruh nyata terhadap peubah tak bebas

H1 = peubah bebas berpengaruh nyata terhadap peubah tak bebas.

Usia debitur merupakan salah satu variabel yang diperhatikan oleh lembaga pembiayaan dalam memberikan suatu pembiayaan, karena hal ini menyangkut kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan (*repayment*). Luas lahan merupakan variabel yang di *proxy* sebagai aset yang dimiliki oleh petani. Aset yang

dimiliki oleh petani selaku debitur merupakan salah satu ukuran yang menjadi penilaian lembaga keuangan untuk menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan. Variabel *cost of fund* merupakan komponen biaya yang harus ditanggung petani untuk mendapatkan sejumlah pembiayaan dari KJKS. Pendapatan usahatani adalah variabel yang merepresentasikan pendapatan yang menjadi sumber pengembalian pembiayaan yang diperoleh petani. Rekam jejak petani selaku debitur dilihat dari lama petani menjadi anggota KJKS. Apabila petani sudah menjadi anggota KJKS dalam rentang waktu yang cukup lama, maka KJKS sudah memiliki informasi yang cukup banyak mengenai karakteristik personal petani, sehingga hal ini akan mempengaruhi tingkat persetujuan pembiayaan yang diajukan

HASIL PEMBAHASAN

Kondisi Pembiayaan Pertanian Syariah di Kabupaten Lampung Tengah

KJKS merupakan lembaga swadaya masyarakat (dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat) yang berbentuk lembaga keuangan koperasi yang berlandaskan syariah. Dewasa ini perkembangan KJKS di Indonesia menunjukkan *tren* peningkatan yang cukup signifikan, termasuk di Kabupaten Lampung Tengah. Pendiri KJKS di Lampung Tengah

secara umum dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: 1) organisasi sosial kemasyarakatan, 2) lembaga koperasi, 3) usaha perorangan atau keluarga, dan 4) bank umum syariah yang bekerjasama dengan kelompok masyarakat.

Pendirian dan kegiatan operasional KJKS dirancang sebagai lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi lebih fokus kepada kelompok masyarakat miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*). Kegiatan utamanya adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui bantuan penguatan permodalan. Dalam tubuh KJKS terdapat dua peran yang saling menunjang, yaitu kepentingan sosial (*baitul maal*) dan kepentingan bisnis (*baitul tamwil*). Sebagai *baitul maal*, KJKS menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta menyalurkannya (*tasaruf*) sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sedangkan sebagai *baitul tamwil*, KJKS berperan dalam mengembangkan usaha-usaha produktif dan meningkatkan kualitas kegiatan pelaku usaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menyalurkan pembiayaan produktif.

KJKS Surya Abadi berdiri sejak tahun 2001 di Kecamatan Seputih Banyak. Alasan dan motivasi utama pendirian KJKS Surya Abadi adalah keprihatinan terhadap kondisi sebagian besar pelaku usaha kecil yang sulit untuk berkembang karena keterbatasan

modal serta banyaknya praktik pembiayaan dengan bunga tinggi yang dilakukan oleh para pelepas uang (*money lender*). Sejak didirikan, pertumbuhan KJKS Surya Abadi menunjukkan *trend* yang positif. Hal itu dapat dilihat dari peningkatan kantor layanan, jumlah anggota, jumlah simpanan anggota, jumlah pembiayaan yang disalurkan, rasio pembiayaan macet (NPF) dan aset. Pada saat ini KJKS Surya Abadi telah memiliki 8 kantor layanan yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur. Jumlah anggota KJKS Surya Abadi sampai dengan Desember 2013 mencapai 15,868 orang dengan jumlah simpanan anggota sebesar Rp 29.7 Milyar. Jumlah pembiayaan yang berhasil disalurkan sampai dengan tahun 2013 meningkat sebesar 23.3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 33.8 Milyar, yang didominasi pembiayaan pada sektor pertanian dan perdagangan. Nilai ratio pembiayaan macet atau *non performing financing* (NPF) pun menunjukkan angka yang rendah, yaitu 1.7 persen. Pada tahun 2014 *asset* KJKS Surya Abadi tumbuh sebesar 36.3 persen, dimana pada tahun 2014 *asset* yang berhasil dibukukan mencapai Rp 55 Milyar.

Produk layanan KJKS Surya Abadi secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendanaan (simpanan) dan

pembiayaan. Produk simpanan sebagian besar menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) dan *wadhiah* (titipan). Bagi hasil yang kompetitif dan pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di KJKS Surya Abadi. Sedangkan untuk produk pembiayaan, akad yang diterapkan lebih beragam, seperti *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kongsi) dan *qardhul hasan* (dana kebaikan). Aplikasi akad yang mendominasi dari pembiayaan pertanian adalah *murabahah*, yaitu dalam bentuk pembelian input produksi, seperti pupuk, pestisida, dan upah tenaga kerja. Pembiayaan pertanian yang disalurkan oleh lembaga keuangan mikro, baik KJKS maupun KSP diarahkan sebagai upaya untuk penguatan sisi permodalan petani. Dengan adanya pembiayaan ini petani diharapkan dapat meningkatkan penggunaan input usahatani menjadi lebih optimal,

sehingga dapat meningkatkan output yang dihasilkan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Pertanian Syariah

Keterbatasan akses petani terhadap sumber pembiayaan berpangkal pada *credit rationing* yang terjadi pada pasar pembiayaan. Salah satu penyebab timbulnya *credit rationing*, khususnya di pasar pembiayaan mikro perdesaan adalah keterbatasan modal dan dana yang dimiliki oleh lembaga keuangan, termasuk KJKS. Berbagai upaya telah dilakukan KJKS untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain meningkatkan dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan masyarakat dan kerjasama dengan perbankan syariah melalui skim *joint financing* atau *chanelling*. Akan tetapi, hal tersebut masih belum mampu memenuhi seluruh permintaan pembiayaan yang diajukan calon debitur.

Tabel 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Pertanian KJKS

Variabel	Parameter Dugaan	t-value	Pr > t
Konstanta	-256.65	-0.19	0.85
Usia (X_1)	-27.78	-0.98	0.33
Luas lahan (X_2)	23.99	1.23	0.22
<i>Cost of fund</i> (X_3)	-20.29 ^a	-20.86	<.0001
Pendapatan usahatani (X_4)	0.23 ^b	2.17	0.03
Lama menjadi anggota KJKS (X_5)	3.83	0.18	0.85
F-Hitung	98.61		
<i>R-square</i>	0.87		

^a berpengaruh nyata pada $\alpha=0.01$, ^b berpengaruh nyata pada $\alpha=0.05$

Tabel 1 menyajikan hasil estimasi model permintaan pembiayaan pertanian syariah KJKS di Kabupaten Lampung Tengah. Hasil estimasi memperlihatkan model yang baik. Hal ini terlihat dari nilai *R-square* sebesar 0.87 yang menjelaskan bahwa sebanyak 87 persen keragaman atau variasi dari permintaan pembiayaan dapat dijelaskan oleh seluruh variabel bebas yang digunakan di dalam model. Nilai statistik uji F sebesar 98.61 yang signifikan pada taraf nyata 1 persen menandakan bahwa seluruh variabel bebas yang digunakan dalam model secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap permintaan pembiayaan pertanian syariah KJKS.

Hasil pengujian parameter secara parsial menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang berpengaruh nyata, yaitu yaitu *cost of fund* pada selang kepercayaan 1 persen dan pendapatan usahatani padi pada selang kepercayaan 5 persen. Sedangkan variabel usia petani, luas lahan, dan lama menjadi anggota KJKS secara statistik tidak berpengaruh nyata. Hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan petani terhadap pembiayaan pertanian KJKS dapat dilihat pada Tabel 1.

Variabel *cost of fund* memiliki

tanda parameter negatif dan signifikan pada taraf kepercayaan 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh petani sebagai debitur untuk mendapatkan pembiayaan pertanian berbanding terbalik dengan tingkat permintaan pembiayaan. Artinya, apabila terjadi kenaikan *cost of fund* maka permintaan pembiayaan pertanian KJKS akan semakin turun. Temuan ini sesuai dengan Nizar (2004) yang menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit usahatani salah satunya adalah suku bunga. Selain itu, dalam konteks biaya transaksi, Kausar (2013) dalam kajiannya menyebutkan bahwa biaya transaksi memiliki korelasi yang negatif dengan tingkat permintaan kredit mikro di Pakistan.

Hasil pendugaan parameter peubah pendapatan dari usahatani padi memiliki tanda positif dan berpengaruh nyata pada selang kepercayaan 5 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan pendapatan usahatani akan meningkatkan permintaan pembiayaan pertanian, atau dengan kata lain petani yang berpendapatan lebih besar memiliki kecenderungan untuk mengajukan permintaan pembiayaan pertanian dibandingkan dengan petani yang berpendapatan lebih rendah.

Semakin tinggi pendapatan usahatani yang diperoleh menunjukkan semakin baik kemampuan petani dalam mengelola usahatannya. Petani biasanya terdorong untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan manajemen usahatani melalui penggunaan berbagai teknologi baru. Upaya perbaikan manajemen usahatani melalui penerapan teknologi baru membutuhkan dukungan modal, sehingga hal ini dapat meningkatkan permintaan petani terhadap pembiayaan pertanian. Dari sisi kreditur, KJKS sebagai lembaga keuangan menganggap petani yang memiliki pendapatan lebih besar memiliki kemampuan pengembalian pembiayaan yang lebih baik, sehingga lebih dipercaya oleh lembaga keuangan. Hasil dari analisis ini sesuai dengan penelitian Nuryartono (2005); Messah dan Wangai (2011); Anyiro dan Oriaku (2011); Azriani (2013), yang menemukan bahwa pendapatan debitur memiliki pengaruh positif terhadap permintaan pembiayaan.

Usia petani tidak menjadi salah satu variabel yang signifikan mempengaruhi permintaan pembiayaan pertanian KJKS, meskipun secara kaidah ekonomi tanda parameter menunjukkan kesesuaian. Hal ini diduga karena

sebagian besar petani di daerah penelitian berada pada usia produktif dan memiliki rentang usia yang tidak jauh berbeda. Usia debitur merupakan salah satu faktor yang diperhatikan oleh lembaga keuangan dalam proses persetujuan permohonan pembiayaan. Seperti yang dikemukakan oleh Ajagbe *et al.* (2012), bahwasanya usia debitur akan mempengaruhi total pinjaman yang diperolehnya. Semakin tua usia debitur maka jumlah pinjaman yang diperoleh akan semakin kecil. Pertambahan usia debitur akan mengurangi usia produktifnya, sehingga lembaga keuangan akan mengurangi jumlah pinjaman terhadap debitur yang lebih tua untuk mengurangi tingkat risiko pengembalian pinjaman.

Variabel luas lahan yang merepresentasikan aset petani memiliki tanda parameter positif dan memenuhi kaidah ekonomi meskipun tidak signifikan. Hasil ini dapat diartikan bahwa petani yang memiliki lahan lebih luas atau aset yang lebih besar cenderung memiliki permintaan kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang luas lahannya lebih sempit. Luas lahan berbanding lurus dengan kebutuhan biaya usahatani. Semakin luas lahan seorang petani, maka kebutuhan akan modal usahatani akan

semakin besar. Selain itu, petani yang memiliki lahan yang luas akan berusaha meningkatkan investasi dalam bentuk pembelian mesin dan peralatan pertanian, sehingga kecenderungan petani untuk mengajukan pembiayaan pun akan semakin besar.

Dari sisi kreditur, KJKS mensyaratkan adanya agunan (*collateral*) dalam proses pengajuan pembiayaan pertanian. Agunan tersebut cukup beragam tergantung pada besaran pembiayaan yang diajukan oleh debitur. Jenis agunan yang paling banyak digunakan petani debitur adalah BPKB sepeda motor, mengingat jumlah pembiayaan diajukan tidak terlalu besar. Namun, terdapat pula petani yang menggunakan SHM atau AJB lahan atau rumah sebagai agunan, apabila jumlah pembiayaan yang diajukan cukup besar. Sebagai lembaga keuangan, KJKS memberikan kepercayaan lebih besar kepada debitur yang memiliki aset yang lebih besar. Hal ini dikarenakan semakin besar aset debitur maka lembaga keuangan memiliki jaminan yang lebih besar terhadap kredit yang disalurkan,

sehingga dapat meminimalisir risiko gagal bayar. Temuan ini memperkuat studi yang dilakukan Ajagbe *et al.* (2012); Zhao *et al.* (2006), dimana jumlah harta atau aset berpengaruh positif terhadap total pinjaman debitur dari kreditur. Menurut Ajagbe *et al.* (2012) makin besar jumlah aset debitur maka lembaga keuangan mikro semakin percaya memberikan pinjaman sehingga permintaan kredit meningkat.

Realisasi Penggunaan Pembiayaan Pertanian Syariah

Pembiayaan pertanian yang disalurkan oleh KJKS diarahkan sebagai upaya untuk penguatan sisi permodalan petani. Dengan adanya pembiayaan ini, diharapkan petani dapat meningkatkan penggunaan input usahatani sehingga menjadi lebih optimal. Akan tetapi, petani sering mengalami permasalahan dalam realisasi penggunaan pembiayaan, di mana petani kesulitan dalam memisahkan kegiatan atau kebutuhan produksi dan konsumsi (Kuntjoro 1983).

Tabel 2. Realisasi Penggunaan Pembiayaan Pertanian Syariah dari KJKS

Uraian	KJKS	
	Jumlah	Persen
Digunakan seluruhnya (100%)	16	39.02
Digunakan sebagian (< 100%)	24	58.54
Tidak digunakan seluruhnya (0%)	1	2.44
Total	41	100.00

Dalam realisasinya, ditemui ketidaksesuaian antara permohonan yang diajukan oleh petani dengan penggunaan pembiayaan pertanian. Pembiayaan pertanian yang diperoleh petani tidak seluruhnya digunakan sebagai modal produksi usahatani padi. Rata-rata realisasi penggunaan pembiayaan pertanian dari KJKS pada usahatani padi hanya 59.70 persen, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa petani yang menggunakan seluruh pembiayaan pertanian dari KJKS sebagai modal produksi usahatani padi berjumlah 39.02 persen, sedangkan sebanyak 58.54 persen hanya menggunakan sebagian dari dana pembiayaan tersebut sebagai modal usahatani, dan terdapat 2.44 persen yang tidak mengaplikasikan pembiayaan pertanian pada usahatani padi. Ketidaksesuaian atau penyimpangan penggunaan pembiayaan pertanian yang diperoleh petani dari KJKS dikarenakan petani menggunakan sebagian dana pembiayaan tersebut untuk modal produksi usahatani lain yang dijalankan oleh petani, seperti sayuran dan ubi kayu, serta terdapat sebagian petani yang menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah

anak dan lainnya. Dilihat dari sisi institusi (KJKS Surya Abadi), *moral hazard* yang terjadi pada pembiayaan pertanian ini tidak mempengaruhi kesehatan KJKS sebagai lembaga keuangan. Hal itu dapat dilihat dari rasio *non performing financing* yang rendah, yaitu 1.7 persen. Kondisi ini disebabkan karena kemampuan petani selaku debitur dalam pembayaran angsuran baik atau lancar. Akan tetapi, dari tinjauan syariah praktik ini sangat bertentangan dengan kaidah syariah karena melanggar akad atau persetujuan pembiayaan yang ditandatangani oleh KJKS selaku pemberi dana (*shahibul maal*) dan petani selaku pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, KJKS sebagai lembaga keuangan syariah harus berupaya untuk menekan terjadinya *moral hazard* dengan melakukan monitoring terhadap penggunaan pembiayaan yang diberikan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan petani terhadap pembiayaan pertanian KJKS adalah *cost of fund* dan pendapatan usahatani,
2. *Moral hazard* terjadi dalam realisasi

penggunaan pembiayaan pertanian. Petani tidak seluruhnya mengaplikasikan pembiayaan yang diperoleh untuk kegiatan usahatani padi. Tingkat realisasi rata-rata pembiayaan pertanian syariah pada usahatani padi adalah 59.7 persen.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ajagbe FA, Oyelere BA, Ajetomobi JO. 2012. Determinants of Small-Scale Enterprise Credit Demand: Evidence From Oyo State, Nigeria. *American Journal of Social and Management Sciences*. 3(1): 45-48.
- Anyiro CO, Oriaku BN. 2011. Access and Investment of Formal Micro Credit by Small Holder Farmers in Abia State Nigeria: A Case Study Of Absu Micro Finance Bank, Uturu. *The Journal of Agricultural Sciences*. 6 (2):69-76.
- Ashari. 2006. Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. *PSEKP*. 4(2):146-164.
- Azriani Z. 2013. Aksesibilitas dan Partisipasi Industri Kecil dan Rumahtangga pada Sumber Pembiayaan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Usaha dan Kesejahteraan Rumahtangga di Kabupaten Bogor Jawa Barat. [Disertasi]. Bogor (ID). Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- [BI] Bank Indonesia. (ID). 2012. Statistik Perbankan Indonesia. Vol: 10 No. 6 Mei 2012. Jakarta (ID). BI.
- [BPS Lamteng] Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. 2013. Lampung Tengah dalam Angka. Gunung Sugih (ID). BPS Lamteng.
- [Dinkop UKM Lamteng] Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah. 2013. Keragaan Koperasi Kabupaten Lampung Tengah. Gunung Sugih (ID). Dinkop UKM Lamteng.
- Freixas X, Rochet JC. 1998. *Microeconomics of Banking*. Massachusetts (US): Massachusetts Institute of Technology.
- Hamid ES, Mubyarto, Dumairy. 1986. Kredit Pedesaan di Indonesia. Yogyakarta (ID): BPFE.
- Jaffee DM, Modigliani F. 1969. *A Theory and Test of Credit Rationing*. *The American Economic Review*. 59 (5): 850-872.
- Kausar A. 2013. Factors Affect Microcredit's Demand in Pakistan. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*. 3(4):11-17.
- Kuntjoro. 1983. Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Kembali Kredit BIMAS Padi (Studi Kasus di Kabupaten Subang, Jawa Barat). [Disertasi]. Bogor (ID). Fakultas Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor .

- Mehrteab HT. 2004. *Adverse Selection and Moral Hazard in Group Based Lending: Evidence From Eritrea*. Thesis. Faculty of Economics. University of Groningen.
- Messah OB, Wangai PN. 2011. Factors that Influence the Demand for Credit for Credit Among Small-Scale Investors: a case study of Meru Central District, Kenya. *Research Journal of Finance and Accounting*. 2 (2).
- Nizar R. 2004. Analisis Permintaan dan Pengembalian Kredit Usahatani oleh Rumah Tangga Petani Padi di Sumatera Barat. [Tesis]. Bogor (ID). Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Nuryartono N. 2005. *Impact of Smallholders' Access to Land and Credit Markets on Technology Adoption and Land Use Decisions: The Case of Tropical Forest Margins in Central Sulawesi-Indonesia*. Cuvillier Verlag: Göttingen, Germany.
- [Puskopsyah Lampung] Pusat Koperasi Syariah Lampung. 2013. Daftar Anggota Puskopsyah Lampung. Metro (ID). Puskopsyah Lampung.
- Rachmina D. 1994. Analisis Permintaan Kredit pada Industri Kecil (Kasus Jawa Barat dan Jawa Timur). [Tesis]. Bogor (ID). Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Stiglitz JE, Weiss A. 1981. Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *American Economic Review*. 71(3) : 393-410.
- Syaukat Y. 2011. Mengembangkan Pembiayaan Syariah Pertanian <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/53629>. [22 Jul 2013].
- Syukur M.2000. Peningkatan Peranan Kredit Dalam Menunjang Agribisnis di Pedesaan: Laporan Hasil Penelitian. Jakarta (ID). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Zhao H, Wu W, Chen X. 2006. *What Factors Affect Small and Medium-sized Enterprise's Ability to Borrow from Bank: Evidence from Chengdu City, Capital of South-Western China's Sichuan Province*. Business Institute Berlin at the FHW Berlin - Berlin School of Economics (Working Paper).